

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Chazawi, Adami. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Denny Kailimang, O.C. Kaligis. Rusdi Nurima. *Praperadilan Dalam Kenyataan*. Jakarta: Djambatan, 1997.
- E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kulia Hukum Pidana II*.
- Efendy, Marwan. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Anggota IKAPI, 2005.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hiariej, Edy O.S. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Sunanto, Mochamad Anwar. Chalima Suyanto. *Praperadilan*. Jakarta: IND-HILL-CO, 1989.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Undang-Undang Tahun 1945.

_____ *Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

_____ *Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, LN No. 157 tahun 2009, TLN No. 5076.

_____ *Undang - Undang Mahkamah Agung*, Undang-Undang No 5 Tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359.

_____ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Undang-Undang Tahun 1945.

_____ *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, LN No. 67 tahun 2004.

_____ *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, LN No. 8 tahun 2004.

_____ *Undang-Undang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, LN No. 254 Tahun 1961, TLN No. 2298.

_____ *Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Indonesia*, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961, LN No.245 Tahun 1961, TLN No.2289.

_____ *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, LN 137 Tahun 2002.

_____ *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, LN 140 Tahun 1999.

R. Soesilo, *RIB/HIR dengan penejelasan [Reglement Indonesia Baru / Herseine Inlandsch Reglement]*, Bogor: Politeia, 1995.

III. ARTIKEL

Fakultas Hukum Indonusa Esa Unggul, “*Modul Hukum Acara Pidana*”, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2008).

Fakultas Hukum Indonusa Esa Unggul, “*Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2010).

Nasakah Sementara Pedoman Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, 2008.

III. INTERNET

Adnan Buyung Nasution, “*Praperadilan vs Hakim komisaris (on-line)*”, tersedia di <http://www.legalitas.org/content/pra-peradilan-vs-hakim-komisaris-beberapa-pemikiran-mengenai-keberadaan-keduanya>, (25 oktober 2010 - 23:00)

<http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/206/gdlhub-gdl-s1-2009-aruansteva-10253-fh20-09> download 20 oktober 2010.

Masyarakat pemantau peradilan indonesia. www.pemantauperadilan.com download 19 Oktober 2010.

http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/11/pk_pollycarpus.pdf download 30 desember 2010.

IV. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan PK No. 152 PK/Pid/2010.

Putusan PT No. 130/PID/PRAP/2010/PT.DKI.

Putusan PN No. 14/Pid.Prap/2010/PN.JKT.Sel.

V. KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Cet 3. Jakarta: Balai Pusataka, 1990.

Bahri, Zainul, *Kamus Umum Bidang Hukum & Politik*, Bandung: Angkasa, 1993.